

NASKAH PUBLIKASI

**PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT ADAT KAMPUNG NAGA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018**

Oleh:

Ilham Aulia Rahman

20150520120

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing


Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP, M.Si.

NIK: 19691214199409 163 029

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

Dr. Tina Purwaningsih, S.IP., M.Si

NIK: 19690822199603 163 038



**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

NIK: 19660828199403 163 025

PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT ADAT KAMPUNG NAGA PADA PEMILIHAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

Ilham Aulia Rahman

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Ilham.aulia.2015@fisipol.umy.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku memilih masyarakat adat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah pemilih spesifik yaitu masyarakat adat Kampung Naga. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan narasumbernya adalah masyarakat dan lembaga adat Kampung Naga. Data perilaku memilih masyarakat adat Kampung Naga diperoleh dengan menggunakan instrumen berupa wawancara dan dokumentasi. Perilaku memilih dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan menggunakan tiga pendekatan perilaku memilih, yaitu dengan pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pilihan rasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku memilih masyarakat adat Kampung Naga adalah dipengaruhi oleh faktor psikologis. Faktor ketokohan menjadi faktor yang sangat dominan dalam mempengaruhi perilaku memilih masyarakat adat Kampung Naga

Kata Kunci : *Perilaku memilih, Masyarakat Adat Kampung Naga, Pemilukada.*

Pendahuluan

Pada penelitian perilaku memilih ini yang membedakan dengan penelitian sebelum-sebelumnya adalah terletak pada objek atau pemilih yang akan diteliti. Pada penelitian perilaku memilih ini objek yang akan diteliti adalah pemilih spesifik dalam satu wilayah yaitu Masyarakat Adat Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya. Masyarakat Adat Kampung Naga adalah salah satu komunitas adat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah penduduk sekitar 300 orang. Masyarakat Adat Kampung Naga sebagai sebuah komunitas adat yang masih memegang teguh kepercayaan adat istiadat, masyarakat adat Kampung Naga masih melaksanakan berbagai tradisi yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal sehingga dikategorikan sebagai masyarakat tradisional.

Sebagai warga Negara sah yang diakui oleh Negara, masyarakat adat memiliki hak politik yang sama dengan warga Negara lainnya yaitu hak memilih di dalam sebuah pemilihan umum. Sebagai masyarakat adat, masyarakat adat Kampung Naga mengikuti proses pemilihan umum tanpa terkecuali. Mereka melaksanakan pemungutan suara seperti lazim pada umumnya, prinsip *one man one vote one value* dengan memberikan suaranya secara langsung di TPS terkait. Masyarakat adat Kampung Naga memiliki kesadaran politik yang sangat baik sehingga memiliki tingkat partisipasi yang baik dalam setiap pemilu.

Salah satu kajian yang populer dalam studi pemilih dalam pemilihan umum adalah perilaku memilih (*voting behavior*). Pertanyaan pokok dalam studi perilaku memilih ini *pertama*, berkaitan dengan partisipasi dalam pemilu; seberapa banyak warga negara yang berpartisipasi dalam pemilihan umum? *Kedua*, berkaitan dengan pilihan

masyarakat terhadap partai politik atau calon; partai atau calon mana yang dipilih dalam pemilihan umum? Mengapa memilih partai atau calon tersebut? Mengapa tidak memilih partai atau calon yang lain? Huntington (1994) menjelaskan dalam studi perilaku memilih, secara garis besar ada tiga pendekatan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu pendekatan Sosiologis, pendekatan Psikologis, dan pendekatan Pilihan Rasional. Pada penelitian ini akan menjelaskan fenomena perilaku memilih pada masyarakat adat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Kerangka Teori

Perilaku Memilih

Syaiful Mujani (2011) menjelaskan perilaku memilih merupakan kegiatan yang dilakukan seorang pemilih dalam menetapkan pilihannya dan memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Perilaku memilih berkaitan dengan tingkah laku individu dalam hubungannya dengan proses pemilihan umum. Perilaku memilih berkaitan dengan partisipasi dalam pemilihan yaitu mengapa seseorang memutuskan untuk ikut serta atau absen dalam sebuah pemilihan umum, pilihan masyarakat terhadap partai politik atau calon kandidat pada pemilihan umum, serta alasan masyarakat memilih partai atau calon kandidat tersebut dan mengapa masyarakat tidak memilih partai atau calon kandidat yang lain.

Perilaku memilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari faktor pengaruh eksternal dan internal. Secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, sedangkan secara eksternal merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya. Secara garis

besar, perilaku memilih dapat diurai dalam tiga madzhab (*school of thought*) atau model, yaitu model sosiologis, model psikologis, dan model pilihan rasional:

a. Model Sosiologis

Asumsi dasar dari pendekatan ini adalah bahwa setiap manusia terikat dalam berbagai lingkaran sosial seperti keluarga, kelompok, tempat kerja, lingkungan dan lain sebagainya. Setiap individu didorong untuk menyesuaikan diri sehingga perilakunya dapat diterima di lingkungan sosialnya. Menurut pendekatan ini, memilih sebenarnya bukan sepenuhnya merupakan pengalaman pribadi, melainkan suatu pengalaman kelompok. Perilaku memilih seseorang cenderung mengikuti arah politik lingkungan sosial dimana ia berada. Roth (2009) menyebutkan ada tiga faktor utama sebagai indeks paling awal dari pendekatan ini yaitu: status sosial-ekonomi, agama, dan daerah tempat tinggal.

b. Model Psikologis

Menurut pendekatan ini yang berpengaruh langsung terhadap pilihan pemilih bukan soal struktur sosial, sebagaimana yang dianalisis oleh pendekatan sosiologis, melainkan faktor-faktor jangka pendek dan panjang terhadap pemilih. Pada pendekatan ini, yang ditekankan adalah bahwa perilaku memilih seorang pemilih dipengaruhi oleh pengalaman yang dialami secara pribadi pemilih serta persepsi atau penilaian seorang pemilih terhadap calon atau kandidat. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi perilaku memilih dalam model ini yaitu penilaian atau persepsi pemilih terhadap tokoh atau calon dan identifikasi partai politik.

c. Pendekatan Pilihan Rasional

Pendekatan ini pada dasarnya menekankan pada motivasi individu untuk memilih atau tidak dan bagaimana memilih berdasarkan kalkulasi mengenai keuntungan yang diakibatkan dari keputusan yang dipilih. Teori yang menempatkan individu, dan bukan lingkungan yang ada di sekitar individu sebagai pusat analisis ini menggunakan pendekatan deduktif. Tentang pemberian suara (*voting*) rational voting hanya merujuk pada pilihan yang didasarkan pada motivasi politik dan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi pada pilihan rasional ini adalah orientasi visi, misi, program serta ekonomi.

Partisipasi Politik

Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik sebagai sebuah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. (Budiardjo, 2008). Sementara Herbert Miclosky mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau secara tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan umum. (Budiardjo, 2008).

Almond & Verba menciptakan istilah budaya politik untuk menilai tahapan partisipasi politik rakyat. Menurut Almond & Verba budaya politik adalah sikap dan kepercayaan serta nilai masyarakat terhadap politik untuk mendukung kestabilan demokrasi. Ada tiga bentuk budaya politik yang mereka kemukakan, yaitu budaya politik tradisional, subjek, dan partisipan.

Pertama, budaya tradisional merupakan partisipasi politik paling rendah, tidak terdapat orientasi terhadap semua komponen politik, input, output, sistem politik, serta peranan diri. Budaya politik ini wujud dalam masyarakat tradisional yang tidak mempunyai peranan politik khusus, tidak ada struktur politik, serta tidak ada kesadaran terhadap sistem politik.

Kedua, budaya subjek, yaitu merujuk kepada masyarakat yang sudah relatif maju akan tetapi pasif. Masyarakatnya mempunyai orientasi terhadap output dan sistem politik, tahu mengenai mekanisme pembuatan keputusan dan mempunyai kesadaran politik. Namun mereka tidak memiliki keyakinan untuk menyuarakan politik. Oleh karenanya, mereka tidak melibatkan diri kedalam aktifitas politik, tetapi mereka taat dan patuh terhadap aturan undang-undang.

Ketiga, budaya politik partisipan yaitu tingkat budaya politik yang paling tinggi dimana terdapat orientasi terhadap empat komponen politik yaitu input, output, sistem politik, dan peranan diri. Masyarakat mampu memainkan peran aktif dalam politik. Mereka mampu memberikan kritik dan menyuarakan pandangan terhadap pemerintah.

Masyarakat Adat

Masyarakat adat satu di dunia internasional dikenal dengan istilah *Indigenous Peoples* ialah kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan karakteristik seperti asal-usul, tanah, wilayah, sumber daya alam, dan identitas budaya yang khas. Masyarakat adat menurut definisi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebuah lembaga yang melakukan *judicial review* terhadap Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa Masyarakat Adat adalah sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sistem budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat.

Ter Haar memberikan pengertian masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu selamanya.

Adapun kriteria masyarakat adat menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah: Memiliki wilayah paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya; Masyarakat yang warganya memiliki

perasaan bersama kelompok; Pranata pemerintahan adat Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau Perangkat norma hukum adat.

Civic Engagement

Definisi *civic engagement* yang paling banyak dikutip adalah pendapat Carpini (1996) dalam (Pancer, 2015) yang mendefinisikan *civic engagement* sebagai “*individual and collective actions designed to identify and address issues of public concern*” (Carpini & Keeter, 1996). Definisi ini secara tegas menunjukkan pada aktivitas untuk menangani permasalahan publik.

Thomas Ehrlich (2000) mendefinisikan *civic engagement* berarti bekerja untuk membuat perbedaan pada kehidupan masyarakat sipil dan mengembangkannya dengan kombinasi pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan motivasi untuk membuat perbedaan. Segala aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan di masyarakat, baik melalui proses politik maupun non politik. Definisi yang diberikan oleh Thomas Ehrlich menjelaskan aktivitasnya lebih meluas dari sekedar penanganan permasalahan sosial dari definisi Carpini. Aktivitas tersebut untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat bukan sekedar kepada *address issues of public concern* saja

S. Mark Pancer (2015) berpendapat bahwa ukuran paling komprehensif untuk dapat menjelaskan *civic engagement* ialah mengacu pada instrumen survey dari *Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement* (CIRCLE) yang berisi 19 item yang dibagi kepada tiga kategori:

- a. *Civic activities* yaitu termasuk aktivitas menolong orang, meningkatkan komunitas lokal. Terdiri dari tingkah laku seperti bekerja sebagai volunteer
- b. *Electoral activities* yaitu yang berkaitan dengan proses politik seperti memberikan dukungan dan berkampanye
- c. *Political voice* yaitu aktivitas di mana memperlihatkan sudut pandang terkait isu sosial yang penting dengan melakukan proses memboikot produk tertentu.

Pembahasan dan Analisis

Partisipasi Politik

Masyarakat adat Kampung Naga menganut budaya politik lebih tinggi selevel dari budaya politik parokial, yaitu budaya politik subjek atau kaula. Masyarakat Kampung Naga memiliki pemahaman dan perhatian terhadap sistem politik, akan tetapi keterlibatan mereka pasif. Masyarakatnya tidak memiliki peran secara khusus dalam politik, akan tetapi mereka menyadari otoritas, tunduk dan patuh pada peraturan pemerintah. Meskipun belum ada peran politik secara khusus, tetapi masyarakat adat Kampung Naga sudah menaruh kesadaran dan perhatiannya terhadap sistem politik salah satunya adalah dengan mengikuti pemungutan suara di dalam sebuah pemilu.

Civic engagement atau *Political engagement* masyarakat adat Kampung Naga sebagai warga Negara sebatas pada output politik saja, tidak ada aktivitas-aktivitas politik lain yang dilakukan. *Civic engagement* (Keterlibatan warga Negara) atau *Political engagement* (Keterlibatan Politik) masyarakat adat

Kampung Naga hanya sebatas pada *Electoral activities* saja seperti yang dijelaskan oleh S. Mark Pancer. Partisipasi atau keterlibatannya tergambar hanya sebatas pada partisipasi mereka pada pemungutan suara dalam pemilu saja. Partisipasi politik masyarakat adat Kampung Naga dipengaruhi oleh sebuah rangsangan politik.

Masyarakat adat Kampung Naga terbuka terhadap politik. Sikap keterbukaan Masyarakat adat Kampung Naga terhadap dunia luar akan memungkinkan mereka menerima sebuah rangsangan politik dari luar. Kunci dari keterbukaan ini adalah *sesepuh* adat.

Sesepuh adat sebagai penjaga adat Naga akan menilai mana dan apa saja yang boleh dan tidak boleh masuk ke Kampung Naga. *Sesepuh* adat berfungsi sebagai penyaring keluar masuknya informasi yang ada di Kampung Naga. Sikap keterbukaan para *sesepuh* adat pada dunia luar tersebut membuat masyarakat Kampung Naga menerima rangsangan politik. Rangsangan politik tersebut dihasilkan dari adanya interaksi *sesepuh* adat sebagai penyaring dunia luar, berinteraksi dengan para tokoh politik, tokoh pemerintahan, maupun organisasi-organisasi lainnya. Para *sesepuh* adat Kampung Naga sering kali menerima kedatangan tamu-tamu dari para tokoh dan calon yang bersilaturahmi ke Kampung Naga. Kedatangan tamu tersebut dalam agenda kunjungan, silaturahmi maupun dalam rangka agenda politik.

Perilaku Memilih

Pendekatan Sosiologis

Perilaku memilih masyarakat adat Kampung Naga pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 lalu pada umumnya merupakan pemilih sosiologis karena masyarakat adat Kampung Naga pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 cenderung memiliki pilihan politik yang sama antara satu orang dengan yang lainnya. Masyarakat adat Kampung Naga cenderung memiliki pilihan politik yang sama karena mengikuti pilihan orang-orang terdekat dilingkungan adat mereka. Masyarakat adat Kampung Naga adalah masyarakat yang spesifik karena hanya dihuni oleh satu golongan masyarakat saja yaitu masyarakat adat asli Kampung Naga. Masyarakat adat Kampung Naga hidup dalam lingkungan sosial yang sama yaitu di lingkungan adat Naga sehingga masyarakatnya tidak beragam dan mempunyai karakter yang sama, maka pilihan politik masyarakatnya akan cenderung sama mengikuti pilihan politik yang ada di lingkungannya.

Status sosial-ekonomi

Status ekonomi masyarakat adat Kampung Naga berada pada tingkatan yang sama atau dibidang rata-rata. Tidak ada perbedaan atau ketimpangan status ekonomi di Kampung Naga hal tersebut karena mereka memiliki prinsip adat dalam hidup mereka yang sederhana serta terbatas kepada hal-hal yang bersifat materialistis. Kemudian melihat kepada jenis pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat adat Kampung Naga yang rata-ratanya adalah sebagai buruh, petani dan pengrajin atau jenis pekerjaan yang lain, akan memiliki penghasilan yang cenderung tidak jauh berbeda. Sehingga tidak ada motif atau perbedaan perilaku yang diakibatkan oleh status ekonomi masyarakat adat kampung Naga.

Agama

Faktor agama dalam mempengaruhi pilihan seorang pemilih terhadap pasangan calon tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku memilih karena masyarakat adat Kampung Naga tidak mempermasalahkan soal agama calon yang mereka pilih. Mereka tidak keberatan jika nantinya mereka memilih atau mempunyai pemimpin yang berbeda agama dengan mereka. Pendapat tersebut menguatkan bahwa latar belakang agama para pasangan calon tidak mempengaruhi pilihan masyarakat adat Kampung Naga karena mereka tidak mempermasalahkan latar belakang agama para pasangan calon. Namun jawaban yang ditemukan dilapangan tentu akan beragam, jika terdapat perbedaan agama antar pemilih, atau antar pasangan calon.

Kesamaan Daerah

Kesamaan daerah antara pasangan calon dengan pemilihnya menimbulkan sebuah hubungan emosional berlandaskan daerah seperti masyarakat adat Kampung Naga pada Pilgub kemarin. Masyarakat adat Kampung Naga pun menginginkan sekali pemimpin mereka yang berasal dari Tasikmalaya. Masyarakat adat Kampung Naga memilih pasangan calon yang berasal dari Tasikmalaya karena mereka betul-betul ingin mendorong putera asli daerah Tasikmalaya sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat.

Pendekatan Psikologis

Figur/Ketokohan

Dari semua sosok calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 ini, figur atau ketokohan dari para calon sangat mempengaruhi pilihan masyarakat adat Kampung Naga. Masyarakat adat Kampung Naga setidaknya tidaknya mengetahui siapa saja calonnya dan siapa mereka sebenarnya, walaupun tidak semua masyarakat tahu terhadap calon, serta semua masyarakat tidak tahu kepada semua calon yang ada.

Masyarakat adat Kampung Naga mempunyai ketertarikan terhadap figur Ridwan Kamil. Informasi tentang kemajuan-kemajuan Kota Bandung yang dilakukan oleh Ridwan Kamil rupanya sampai ke masyarakat adat Kampung Naga. Masyarakat adat Kampung Naga menilai bahwa Ridwan Kamil telah berhasil membangun Kota Bandung ketika menjabat sebagai Walikota Bandung. Persepsi masyarakat adat Kampung Naga terhadap Ridwan Kamil tersebut merupakan sebuah penilaian mereka sebagai pemilih terhadap calon dan merupakan sebuah evaluasi yang datang dari seorang pemilih terhadap calon.

Sosok atau figur lain yang dianggap berpengaruh oleh masyarakat adat Kampung Naga adalah sosok Anton Charliyan. Sosok beliau sudah tidak asing lagi bagi masyarakat adat Kampung Naga. Masyarakat adat Kampung Naga melihat sosok Pak Anton Charliyan sebagai seorang pemimpin yang memiliki nilai kebudayaan yang kuat. Kecintaan Pak Anton terhadap kebudayaan Sunda

beliau tunjukan dengan kepeduliannya terhadap masyarakat adat salah satunya kepada mereka masyarakat adat Kampung Naga.

Pak Anton Charliyan juga merupakan seorang budayawan. Beliau aktif menulis artiel-artikel yang berkaitan dengan sejarah serta kebudayaan nusantara melalui blog pribadinya. Selain itu juga Pak Anton sering *napak tilas* yakni mencari kembali makam-makam para karuhun atau leluhur Sunda yang telah lama hilang dan menjadikannya sebagai tempat ziarah kebudayaan seperti yang ada di Tasikmalaya yang beliau kelola sendiri. Masyarakat adat Kampung Naga merasa dirinya cocok dengan sosok Pak Anton Charliyan karena sama-sama cinta terhadap kebudayaan serta warisan adat Sunda.

Identifikasi Partai

Suara partai politik yang ada di wilayah Kampung Naga dan sekitarnya adalah partai PDIP dan partai Golongan Karya. Kampung Naga dan sekitarnya menjadi basis masa atau suaranya partai PDIP dan partai Golongan Karya. Hal tersebut dilihat dari hasil dua perolehan suara tertinggi yaitu pasangan cagub dan cawagub nomor 02 dan pasangan cagub cawagub nomor urut 04 mengungguli pasangan lainnya di TPS 2 Desa Neglasari. Suara masyarakat adat Kampung Naga dalam setiap pemilu selalu diberikan kepada partai PDIP. Akan tetapi pemberian suara tersebut bukan karena masyarakat adat Kampung Naga yang menjadi anggota partai tersebut. Hubungan masyarakat adat Kampung Naga dengan partai PDIP hanya sebatas keanggotaan psikologis saja artinya mereka bukan anggota resmi dari partai PDIP.

Masyarakat adat Kampung Naga memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur melihat kepada sosok atau figur calon. Partai pengusung calon yang mereka pilih tidak mempengaruhi pilihan mereka kepada Anton Charliyan. Sulit untuk membuktikan bahwa partai pengusung calon tidak mempengaruhi terhadap pilihan masyarakat adat Kampung Naga karena Pak Anton Charliyan diusung oleh PDIP yang menjadi partai pilihan mereka. Tetapi jika melihat kepada Pilgub Jabar sebelumnya di tahun 2013 lalu masyarakat adat Kampung Naga memilih calon Gubernur Dede Yusuf dari Partai Demokrat, padahal partai PDIP yang menjadi pilihan mereka di setiap pemilu mengusung Rieke Dyah Pitaloka sebagai calon Gubernurnya.

Pendekatan Pilihan Rasional

Oreintasi visi, misi, program.

Masyarakat adat Kampung Naga pada Pilgub Jabar 2018 lalu tidak memiliki orientasi terhadap visi, misi, serta program dari tiap kandidat. Masyarakat adat Kampung Naga tidak mengetahui visi, misi, serta program semua pasangan calon termasuk calon yang mereka pilih. Kondisi masyarakat adat Kampung Naga seperti yang memiliki keterbatasan terhadap akses informasi menjadi alasan mengapa masyarakat adat Kampung Naga tidak memiliki orientasi terhadap isu-isu tersebut. Keterbatasan pengetahuan, akses informasi serta tingkat pendidikan masyarakatnya yang rendah menyebabkan masyarakat adat Kampung Naga menjadi sebuah alasan utama mengapa masyarakat adat mengabaikan orientasi visi, misi, serta program para pasangan calon.

Ekonomi

Masyarakat adat Kampung Naga bukan pemilih strategis seperti yang dikatakan Downs, justru mereka berlaku menjadi pemilih irasional pada Pilgub Jabar 2018 lalu. Pernyataan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 02 adalah sesuatu yang tidak rasional, karena jauh sebelum hari pemungutan suara digelar beberapa lembaga survey menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan calon nomor urut 02 menempati urutan terakhir, itu artinya sangat sedikit sekali kemungkinan pasangan calon tersebut untuk memenangkan Pilgub Jabar 2018.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat Kampung Naga tidak berorientasi kepada untung rugi dalam memilih. Tidak ada motif ekonomi yang mendasari tiap individu maupun kelompok masyarakat adat Kampung Naga. Bagi mereka memilih bukan soal untung dan rugi yang didapatkan tetapi yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana pemilu yang dilaksanakan adalah sebuah ikhtiar untuk mencari pemimpin yang baru. Mereka menaruh kepercayaan kepada siapa saja yang terpilih nantinya akan membawa perubahan yang lebih baik tidak hanya bagi mereka saja tetapi bagi semua masyarakatnya.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian perilaku memilih masyarakat adat Kampung Naga pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku memilih masyarakat adat Kampung Naga pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 dipengaruhi oleh faktor lingkungan adat mereka. Masyarakat adat Kampung Naga cenderung mengikuti arahan dan pilihan politik di lingkungan adatnya.
2. Masyarakat adat Kampung Naga dalam memilih pasangan calon adalah melihat ketokohan atau figure dari calon tersebut. Faktor ketokohan sangat dominan dalam mempengaruhi pilihan masyarakat adat Kampung Naga.

Penelitian perilaku memilih masyarakat adat Kampung Naga pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 menghasilkan saran sebagai berikut:

Masyarakat adat Kampung Naga harus diberikan edukasi serta pengetahuan yang lebih mengenai pemilihan umum terutama yang berkaitan dengan visi, misi, serta program para pasangan calon. Hal tersebut seharusnya sudah menjadi tugas dari para calon melalui tim partai atau tim sukses masing-masing calon sehingga masyarakat adat Kampung Naga bisa menjadi pemilih yang kritis terhadap setiap program yang ditawarkan pasangan calon. Sehingga nantinya, jika pasangan calon yang sudah terpilih menjadi pemimpin, masyarakat adat Kampung Naga dapat memberikan penilaian, masukan serta mengkritisi setiap kebijakan yang dibuat oleh pasangan calon terpilih.

Daftar Pustaka

- Joan Nelson & Samuel P. Huntington. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mujani, Saiful. (2011). *Kuasa Rakyat (Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru)*. Jakarta: Mizan Publika.
- Dieter, Roth. (2009). *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*. Jakarta: Lembaga Survei Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. (2004). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Nusantara
- Ehrlich, T. (2000). *Civic responsibility and higher education*. Phoenix, AZ: Greenwood Publishing Group.
- Carpini, M. D., & Keeter, S. (1996). *What Americans Know about Politics and Why it Matters*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

www.aman.or.id